FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:

Yogik Aninditia
NIM.13.0102.0063

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh:

Yogik Aninditia

NIM.13.0102.0063

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2018

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL
(Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Yogik Aninditia

NPM **13.0102.0063**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **23 Februari 2018**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Siti Noor Khikmah, SE, M.Si, Ak
Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Siti Noor Khikmah, SE, M.Si, Ak
Ketua

Barkah Susanto, SE., M.Sc.
Sekretaris

Amisa Hakim Purwantini, SE., M.Sc.
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 24 MAR 2018

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Yogik Aninditia
NPM	: 13.0102.0063
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 22 Maret 2018

Pembuat Pernyataan

Yogik Aninditia

NPM 13.0102.0063

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Yogik Aninditia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tanggal lahir	: Temanggung, 22 Juni 1992
Agama	: Islam
Status	: Kawin
Alamat Rumah	:.Dsn Sendang RT03 RW.06 Kedungumpul Kandangan Kabupaten Temanggung
Alamat email	: -

Pendidikan Formal :

Sekolah Dasar (1998 – 2004)	: SD N Kedungumpul Kab.Temanggung
SLTP (2004 – 2007)	: SMP N 5 Temanggung
SMU (2007– 2010)	: SMK 1 Temanggung
Perguruan Tinggi (2013 – 2018)	: S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Magelang, 22 Maret 2018

Peneliti

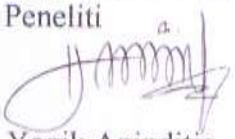

Yogik Aninditia

NPM. 13.0102.0063

MOTTO

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, (2) dan kamu Lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, (3) Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

(Q.S. An Nashr : 1 – 3)

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung). Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih, atas bantuan dan bimbingannya, kepada yang terhormat :

1. Siti Noor Khikmah, SE, M.Si, Ak, sebagai Pembimbing utama, yang telah dengan tekun dan sabar membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan bekal ilmu
3. Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada khususnya dan Universitas Muhammadiyah pada umumnya.
4. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti selama penyusunan karya ilmiah ini.

Semoga amal budi baik Bapak dan Ibu mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yaa Robbal 'Alamin.

Magelang, 22 Maret 2018

Peneliti

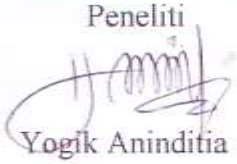

Yogik Aninditia

NPM. 13.0102.0063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAKSI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka 11
1. Teori Keagenan 11
2. Standar Akuntansi Pemerintah..... 12
3. Akuntansi Berbasis Akrual 13
4. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual..... 15
5. Implementasi SAP Berbasis Akrual..... 16
6. Kualitas Sumber Daya Manusia 17
7. Komitmen Organisasi 18
8. Sistem Informasi 19
9. Komunikasi 23
10. Sistem Pengendalian Intern 24

B. Hasil Penelitian Sebelumnya..... 25
C. Pengembangan Hipotesis 28
D. Model Penelitian 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel..... 35
B. Data Penelitian..... 35
C. Definisi Operasional Variabel 37
D. Metode Analisa Data 41

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Data Penelitian 46
B. Uji Validitas dan Reliabilitas 52
C. Hasil Pengujian Hipotesis..... 54
1. Persamaan Regresi 54
2. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 56
3. Uji *Goddness Fit* 56
4. Uji t statistik 57
D. Pembahasan 60

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan 68
B. Keterbatasan penelitian 69
C. Saran-saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN-LAMPIRAN 75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 :Hasil Penelitian Terdahulu 25
Tabel 4.1 :Penyebaran Kuesioner..... 46
Tabel 4.2 :Deskripsi Responden..... 48
Tabel 4.3 : Statistik Deskripstif 48
Tabel 4.4 : Uji Validitas 52
Tabel 4.5 : Uji Reliabilitas..... 53
Tabel 4.6 : Regresi Linier Berganda 54
Tabel 4.7 : Uji Koefisien Determinasi 56
Tabel 4.8 : Uji *Goodness Fit* 56
Tabel 4.9 : Hasil Analisis Regresi 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Model Penelitian 34

Gambar 3.1: Kurva Normal Uji F..... 44

Gambar 3.2: Kurva Normal Uji t..... 45

Gambar 4.1: Kurva Uji *Goodness Fit* 57

Gambar 4.2:Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual 58

Gambar 4.3:Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual 58

Gambar 4.4:Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual 59

Gambar 4.5:Pengaruh Komunikasi terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual 59

Gambar 4.6:Pengaruh Pengawasan Intern terhadap Penerapan SAP Berbasis Akrual 60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Kuesioner 75
Lampiran 2 : Diskriptif Statistik 78
Lampiran 3 : Hasil analisis Uji Validitas 80
Lampiran 4 : Hasil analisis Uji Reliabilitas 85
Lampiran 5 : Hasil analisis regresi ganda 91
Lampiran 6 : Rincian Jawaban Responden 93

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung)

Oleh :
Yogik Aninditia
NIM 13.0102.0063

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, komunikasidan sistem pengendalian intern terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bidang Perencanaan di Kabupaten Temanggung dan pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan analisis regresi linier berganda.Hasil uji R^2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted* R^2sebesar 0,452, hal ini berarti bahwa kulitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi&komunikasi dan pengawasan intern dalam menjelaskan variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sebesar 45,20% dan model yang digunakan dalam penelitian ini bagus (*good fit*). Hasil analisis individual dapat dikemukakan bahwa komitmen organisasi, komunikasi dan pengawasan intern berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.Variabel kualitas sumber daya manusia dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Kata kunci : **Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, komunikasi, sistem pengendalian intern, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pengelolaan keuangan Negara masih terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai komitmen pemerintah dalam pengelolana keuangan keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan ketaatan. Bergesernya paradigma terhadap pemerintahan saat ini, mendorong diwujudkannya suatu sistem tata pemerintah yang baik *(good governance)*, dengan jalan mewujudkan lahirnya tata pemerintah yang demokratis dan diselenggarakan secara baik, bersih, transparan, partisipatif serta akuntabilitas sehingga memiliki kredibilitas. Pemerintah dalam mewujudkan suatu sistem tata kepemerintahan yang baik *(good governance)*, perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (Langelo, dkk., 2015).

Mardiasmo (2002: 21) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Mahsun et al., (2011: 142) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Berdasarkan Peraturan

PemerintahNo. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahmerupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No 24 tahun 2005). Pada hakekatnya untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Pemerintah menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum untuk itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur pemda khususnya pegawai bagian keuangan, terkait konsep Akuntansi berbasis Akrual akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan. Aparatur pemda

khususnya pegawai bagian keuangan tidak cukup hanya menguasai penata usahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadidan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kegagalan SDM Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidak sesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam halini, umumnya Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan jumlah SDM yang menguasailogika akuntansi secara baik.

Hasil penelitian Darma Putra dan Ariyanto (2015) menyebutkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di seluruh SKPD Kabupaten Badung. Hasil ini memberikan arti bahwa kualitas sumber daya manusia komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan mempunyai peranan penting dan mampu mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hasil penelitian Yafie (2016) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki empat dimensi yang meliputi aspek kelebihan dan kelemahan serta aspek peluang dan tantangan. Oleh karena itu, agar pelaksanaan akuntansi basis akrual dapat diterapkan secara penuh diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: (1) Perbaikan yang harus dilakukan pada sistem akuntansi dan teknologi akuntansi yang memadai, termasuk sistem pengendalian intern yang andal; (2) Tersedianya tenaga akuntan yang kompeten sebagai persyaratan SDM yang memadai; (3) Strategi

yang tepat digunakan untuk penerapan basis akrual; (4) Komitmen politik; serta (5) Pengkomunikasian tujuan diterapkannya basis ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan Riyani, Mustafa & Suherma (2017) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman menjalankan Sistem Akuntansi Kas Menuju Akrual, latar belakang pendidikan pemimpin dan ukuran Satuan Kerja berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada kota Pontianak.

Hasil penelitian Puspitasari, Mulyani dan Yunita (2016) menunjukkan bahwa komitmen pimpinan menjadi faktor krusial utama dan pertama yang akan mendukung keberhasilan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Komitmen pimpinan dinyatakan menjadi faktor yang bisa menciptakan *platform* secara menyeluruh dan menyentuh semua pihak, termasuk pihak-pihak SKPD dan pihak-pihak lainnya yang 'berkesan' memiliki pemahaman bahwa masalah akuntansi hanyalah masalah dan tugas 'Bagian Akuntansi' saja. Didukung oleh pihak (pimpinan) legislatif, dengan adanya komitmen pimpinan ini semua pihak akan 'dipaksa' untuk terlibat dalam proses implementasi. Lebih lanjut, sistem *reward* dan *punishment* yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi para Kepala SKPD yang dinyatakan menjadi penyebab kegagalan pemda mendapatkan opini terbaik (wajar tanpa pengecualian). Kemampuan sumber daya manusia adalah faktor kedua yang akan mendukung keberhasilan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Sayangnya, semua pemda menyatakan bahwa kondisi yang ada pada saat ini adalah hanya sedikit Prosiding ISBN : 978-602-17225-6-5 saja sumber daya

manusia yang bertugas di Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang memiliki kemampuan akuntansi yang baik dan mumpuni. Terutama aparatur yang bertugas di unit-unit kerja. Langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut melakukan kebijakan yang hampir sama, antara lain: (1) memberikan beasiswa formal dan informal untuk studi akuntansi bagi para aparatur dan mendapatkan sertifikasi; (2) memperbanyak aparatur dengan latar belakang studi akuntansi; dan memberikan pendidikan dan pelatihan akuntansi. (3) Diperlukan adanya regulasi daerah yang mendukung dan menjadi payung hukum implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. (4) Diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi dengan auditor internal dan eksternal secara sistematis dan berkelanjutan. Koordinasi dan komunikasi dengan auditor internal (inspektorat) dilakukan dalam bentuk review atas laporan keuangan secara rutin, yang hasilnya berupa rekomendasi untuk perbaikan secara berkelanjutan. Komunikasi dan koordinasi dengan pihak auditor eksternal dilakukan untuk memperbaiki berbagai temuan audit yang ada. (5) Pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Aplikasi ini dirasakan benar sangat membantu pemda dalam menyusun laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Meskipun ketiga pemda sepakat bahwa untuk bisa mendapatkan aplikasi sistem yang benar-benar sesuai diperlukan pengembangan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi secara empiris mempunyai

peranan penting dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu sistem informasi, komunikasi dan sistem pengendalian internal juga merupakan aspek-aspek penting dalam implementasi SAP berbasis akrual. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil pokok masalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Darma Putra dan Ariyanto (2015), dengan perbedaan, **Pertama,** penelitian ini menambah variabel sistem informasi, komunikasi dan sistem pengendalian internal. Alasan yang mendasari penambahan variabel sistem informasi yaitu bahwa dengan sistem informasi yang lengkap dan ter *up-date* secara in time, maka semua data akan mampu menjadi bahan informasi yang komprehensif dalam penerapan SAP berbasis akrual. Komunikasi yang berkesinambungan dari pemerintah pusat maupun daerah juga merupakan salah aspek dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Sebagai layaknya suatu peraturan baru yang mengatur standar yang berbeda cukup jauh dari standar yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baru ini dapat terlaksana dengan baik. Setiap perubahan, dimungkinkan ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Kondisi tersebut tentunya memerlukan kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga penerapan akuntansi

pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik tanpa ada resistensi. Berbagai masalah komunikasi yang tidak efektif dan peranan sistem pengendalian internal juga mempunyai peranan penting dalam penerapan SAP berbasis akrual. Sistem pengendalian internal pada dasarnya sebagai ujung tombak dalam penerapan SAP berbasis akrual, dimana dari satuan pengendalian internal ini semua sistem admistrasi akan dikendalikan. Oleh karena itu sistem pengendalian internal mempunyai peranan penting dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Kedua, penelitian terdahulu mengambil penelitian pada SKPD di Badung, sedangkan dalam penelitian ini mengambil obyek pada Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Alasan yang mendasari dari pengambilan obyek penelitian di Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yaitu bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menyoroti adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain: (1) pertanggung jawaban Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan dan verifikasi SPJ belum sepenuhnya sesuai ketentuan, (2) pengelolaan kas belum memadai, (3) pengelolaan pasar di wilayah Kabupaten Temanggung kurang memadai, (4) pengelolaan aset tetap dan aset lainnya kurang memadai, (5) harga penjualan produksi usaha daerah berupa benih ikan dan ikan konsumsi tidak sesuai dengan Perda. BPK juga menemukan adanya ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

pengelolaan keuangan daerah, antara lain: (1) kelebihan pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras, (2) kelebihan pembayaran tunjangan PPh Pasal 21, (3) kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas, (4) Pengalihan hak atas tanah dan bangunan untuk pengadaan tanah belum dipungut pajak, dan (5) kelebihan pembayaran atas enam paket pekerjaan dan denda atas keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
4. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
2. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
3. Mengetahui pengaruh sistem informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
4. Mengetahui pengaruh komunikasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?
5. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual?

D. Kontribusi Penelitian

1. Aspek teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dari pengembangan teori yang ada. Penelitian ini juga diharapakan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek praktis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, sebagai masukan bagi pemerintah dan meningkatkan pemahaman mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual.

E. Sistimatika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi gambaran umum masalah objek penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistimatika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis

Pada bagian ini akan dikemukakan teori-teori yang diambil dari beberapa literatur atau pustaka yang dijadikan landasan pembahasan. Selain itu dalam bab ini akan disajikan pula hasil penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis dan model penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bagian ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian meliputi populasi dan sampel, data penelitian, variabel penelitian dan pengukuran data, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

Bab IV : Hasil dan Pembahsan

Pada bagian ini akan diuraikan hasil dan pembahasan. Bagian ini meliputi statistik deskriptif variabel penelitian, pengujian instrumen data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V : Kesimpulan.

Pada bagian ini merupakan bab penutup atau bagian terakhir dari penyusunan hasil penelitian. Bagian ini meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Konflik kepentingan akan muncul dari pendelegasian tugas yang diberikan kepada agen dimana agen tidak dalam kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan principal, tetapi mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik.

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*. Diakui atau tidak pada pemerintahan terdapat hubungan dan masalah keagenan (Abdullah, 2006). Konteks organisasi sektor publik, Mardiasmo (2002: 20) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Pendapat Mardiasmo (2002:20) tentang akuntabilitas dalam

konteks sektor publik mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah sebagai agent. Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan sering disebabkan oleh adanya benturan kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder, namun seringkali manajemen bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan dan mengamankan posisi tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan.

Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari agen kepada principal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai dengan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan basis akrual. Penerapan akuntansi akrual pada pemerintah dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban pemerintah sebagai agen kepada masyarakat sebagai principal.

2. Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002: 21) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip – prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Menurut Mahsun *et al.*, (2011: 142) standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun

dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 2005). Cara memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah di Republik Indonesia,diperlukan sebuah Standar AkuntansiPemerintah (SAP) yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah Komite SAP.

3. Akuntansi basis akrual

Menurut Kieso dkk., (2008: 2) akuntansi basis akrual (*accrual basis ofaccounting*) dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui padaperiode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktek akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saatkewajiban timbul. Basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruharus

sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal dan arus ekonomi lainnya. Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidak cukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat.

Widjajarso (2008) menyampaikan beberapatujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan dalam sektor publik.
b. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektorpublik.
c. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasaoleh pemerintah.
d. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk mengambil keputusan.
e. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja.
f. Untuk mencapai transparasi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan penerapan akuntansi basis akrual pada dasarnya untuk memperoleh informasi yang tepat atas jasa yang diberikan pemerintah dengan lebih transparan.Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Pada level yang lebih detail, pelaporan dengan basis akrual mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan dananya.
b. Memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saaat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan komitmennya.
c. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya.
d. Memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya, dan bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Mardiasmo (2002: 25) mengemukakan bahwa alasan-alasan penggunaan basis akrual diantaranya adalah:

a. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang danpiutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
b. Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
c. Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

4. **Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual**.

Menurut Mulyana (2009) penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi basis akrual dapat dilakukan secara *top-down* atau *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (*time frame*) yang pasti dan seragam. Sedangkan bila diterapkan secara bottom-up, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik. Penerapan secara *bottom-up* dapat dilakukan dalam *time frame* pendek, maupun *time frame medium*. Penerapan akuntansi akrual dalam *time frame* pendek akan beresiko timbulnya *reform fatigue* yaitu hilangnya *sense of urgent* dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan perubahan perubahan yang terus-menerus tanpa merasakan manfaatnya secara langsung. Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam *time frame medium*.

Penerapan secara *time frame medium* dapat dilakukan dengan cara terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di pemerintah pusat yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai *pilot project*. Apabila *pilot project* sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah lainnya (Mulyana, 2009).

5. Implementasi SAP Berbasis Akrual

Perubahan dari *cash basis* menjadi *accrual basis* memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru.Perlu analisis yang mendalam dan kompleks

terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologis masyarakat negara tersebut (Mardiasmo, 2009). Nazier (2009) menyatakan perubahan fundamental sistem pelaporan dan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* perlu dikelola dan dipersiapkan dengan baik.Dalam perubahan sistem pelaporan mensyaratkan agar proses transfer tersebut berjalan dengan lancar perlu persiapan memadai yang meliputi adanya mandat dari peraturan perundang-undangan yang jelas, komitmen politik, komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, SDM yang memadai, kemampuan teknologi dan sistem informasi yang memadai , dan wewenang dalam melakukan perubahan yang didukung oleh legislatif.

6. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2002: 3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi (2003:37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian sumber daya manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lainnya. Sumber daya manusia (SDM)

adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hasibuan (2002: 12) membagi komponen SDM menjadi pengusaha, yaitu setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut. Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi :

a. Karyawan operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.
b. Karyawan manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah.

Menurut Hasibuan (2002:1), pengelolaan sumber daya manusia berarti penyiapan dan pelaksanaan suaturencana yang terkoordinasi untuk menjamin bahwa sumber daya manusia yang ada dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

7. Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2002), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam

organisasi tersebut. Komitmen organisasi merupakan salah satu sikap kerja, karena ia merefleksikan perasaan seseorang (suka atau tidak suka) terhadap organisasi tempat bekerja. Hal ini didefinisikan sebagai suatu orientasi individu terhadap organisasi yang mencakup loyalitas, identifikasi, dan keterlibatan. Komitmen organisasi merupakan orientasi hubungan aktif antara individu dan organisasi. Orientasi hubungan tersebut mengakibatkan individu atas kehendak sendiri bersedia memberikan sesuatu dan sesuatu yang diberikan itu menggambarkan dukungannya bagi tercapainya tujuan organisasi.

Miner (1992:124) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Sikap ini dapatditandai dengan empat hal, yaitu indikatornya diantaranya:

a. Kepercayaan karyawan terhadap organisasi
b. Partisipasi karyawan dalam aktivitas kerja
c. Loyalitas terhadap organisasi
d. Adanya Perasaan menjadi bagian dari organisasi

Komitmen organisasi lebih dikenal sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi. Komitmen organisasi ini memiliki dua komponen, yaitu sikap dan kehendakuntuk bertingkah laku.

8. Sistem Informasi

Sistemadalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkanbersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau

energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsurtersebut dengan lingkungan.

Menurut Mukhtar (2002: 2), sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yangrelevan dengan tugas akuntansi adalah *computer based system*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugaspada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefinisikan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu (Jogiyanto, 2010 : 53)yaitu:

a. Komponen sistem

   Sistem terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan dapatberupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat dari sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

b. Batas sistem

   Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

c. Lingkungan luar sistem

Lingkungan luar dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

d. Penghubung sistem

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya.

e. Masukan dan keluaran sistem

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Sedangkan keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dari sisa pembuangan.

f. Sasaran sistem

Informasi merupakan hasil suatu pemrosesan, manipulasi dan pengorganisasian/ penataan dari sekelompok data yang mempunyai nilai pengetahuan (*knowledge*) bagi penggunanya. Informasi memiliki nilai ekonomis jika ia dapat membantu dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya, jadi membantu sistem untuk mencapai tujuannya.

Tujuan sistem informasi dan kebutuhan informasi yang didefinisikan secara jelas adalah salah satu kunci untuk suksesnya sistem informasi. Kualitas suatu informasi tergantung dari beberapa hal yaitu (Mukhtar, 2002: 4):

a. Akurat

Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tida kmenyesatkan. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi

sampai kepenerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat merubahatau merusak informasi tersebut.

b. Tepat waktu

Ini berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Jika pengambilan keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.

c. Relevan

Relevan berarti informasi tersebut harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevan dapat juga diartikan sebagai kesesuaian antara informasi dengan realitas yang terjadi.

d. Lengkap

Informasi yang disajikan termasuk di dalamnya semua data-data yang relevan dantidak mengabaikan kepentingan yang diharapkan oleh pembuat keputusan.

e. Dapat dimengerti

Informasi yang disajikan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pembuat keputusan. Nilai dari informasi ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya.

Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontroldan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sistem informasi yang lengkap akan memberikan kemudahan

dalam pengambilan keputusan yang komprehensif dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

9. Komunikasi

Teknologi Komunikasi adalah peralatan perangkat keras (hardware) dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan saling tukar menukar informasi dengan individu-individu lain. Teknologi komunikasi ditekankan pada sebagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disebarkan dan disampaikan ke tempat tujuan sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh.

Menurut Edwar dalam Herlina (2013) komunikasi adalah salah satu faktoryang mempengaruhi proses implementasi. Persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sedangkan menurut Robbins (2002: 392) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaiandan pemahaman makna. Sehebat apapun gagasan, tidak akan berguna jika tidak diteruskan dan dipahami orang lain. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagiefektivitas kelompok atau organisasi manapun. Komunikasi yang baik dalam suatu organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

10. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Internal adalah salahsatu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas suatu program atau kegiatan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Menurut Arens et al (2008) sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efesiensi dari operasional.

Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didisain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan: (a) efektivitas dan efisiensi operasi (b) keandalan laporan keuangan dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Moeller, 2007) dalam Hidayah et al (2015).

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan system serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus dikontrol agar tetap dapat berjalan baik. Tahun 1994 *Committee of American institute of Accountants* (sekarang bernama *The American Institue Of Certified Publik Accountant* atau AICPA)

mendefinisikan pengertian pengendalian intern sebagaimana dikutip oleh Bastian (2009: 51) pengendalian intern rencana organisasi dan semua metode sertaketentuan yang terkoordinasi yang dianut perusahaan untuk melindungi hartamiliknya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan fisiensi usaha, dan mendorong diataatinnya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Hasil-hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Darma Putra dan Ariyanto (2015)	**Variabel Bebas** Kualitas SDM Komunikasi Komitmen organisasi Gaya Kepemimpinan **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di SKPD Kabupaten Badung.
2	Puspitasari, Mulyani dan Yunita (2016)	**Variabel Bebas** Kualitas SDM Komitmen organisasi Teknologi informasi Komunikasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel kualitas SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Barat, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu
(Lanjutan)

No	Nama	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
3	Fitrizal (2012)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Sistem informasi Komitmen organisasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, Sistem Informasi dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual
4	Kusuma (2013)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Komitmen organisasi Sistem informasi Infrastruktur **Variabel Terikat** Sistem Pengendalian Internal berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, dan infrastruktur berpengaruh pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh pada penerapkan standar akuntansi berbasis akrualPemerintah Kabupaten Jember
5	Widyastuti dkk. (2015)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Sistem informasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual, sistem informasiberpengaruh pada penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrualPemerintahKabupaten Gianyar
6	Sukadana dan Mimba (2015)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Sistem informasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual, sistem informasiberpengaruh pada penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar

Tabel 1
Hasil Penelitian Terdahulu
(lanjutan)

No	Nama	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7	Adventana dan Kurniawan (2015)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Komitmen organisasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8	Putra dan Ariyanto (2015)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Komitmen organisasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi berpengaruh pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada SKPD Bandung
9	Jaladri dan Liharjo (2016)	**Variabel Bebas** Kualitas sumber daya manusia Sistem pengendalian internal Infrastruktur Komitmen Organisasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusiatidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual, sedangkan system pengendalian internal, infrastruktur dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrualdi SKPD Malang
10	Safitri (2017)	**Variabel Bebas** KualitasSDM Sistem informasi Komitmen Organisasi Informasi **Variabel Terikat** Implementasi SAP berbasis akrual	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, system informasi, komitmen organisasi, informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrualdi SKPD Bengkalis
11	Dewi dkk. (2017)	**Variabel Bebas** Kualitas SDM Komitmen Organisasi Sistem pengendalian internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan system pengendalian internal berpengaruh terhadap

	Variabel Terikat Implementasi SAP berbasis akrual	penerapan SAP berbasis akrual pada SKPD di pada Kabupaten Bangli.

C. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian landasan teori di atas, dapat dikembangkan hipotesis berdasarkan faktor - faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual di instansi pemerintah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Sumber daya manusia dalam penerapan Setandar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan teori *agency*, yaitu Sumber Daya Manusia memiliki peranan sentral dalam menentukan keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini juga ditunjukan dalam pelatihan seorang pegawai yang memadahiakan memberikan dampak efek positif terhadap kesuksesan pelaporan sistem akuntansi pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darma Putra dan Ariyanto (2015), Sukadana dan Mimba (2015) menunjukan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual di SKPD Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, Kota Denpasar, dan Provinsi Bali.Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adventana dan Kurniawan (2015) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Penelitian ini juga membuktikan Sumber daya manusia merupakan kunci terpenting dalam melaksanakan suatu sistem.Baik buruknya suatu sistem ditentukan oleh kulitas kerja yang ditunjukkan oleh sumber daya manusia tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi sumber daya manusia semakin tinngi pula penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan uraian hipotesis yang diajukan adalah :

H_1: Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

2. Pengaruh komitmen terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual

Berdasarkan teori*agency*, seorang pegawai yang bekerja dalam pemerintahan memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilannya demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi organisasi akan tercapai dengan kontribusi mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja.

Hasil penelitian yang dilakukan olehPutra dan Ariyanto (2015) menunjukan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adventana dan Kurniawan (2015) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat hubungan positif dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

Karyawan yang memiliki komitmen tinggi dalam organisasinya akan lebih baik dalam menerapkan standar akuntansi berbasis akrual. Manajemen perusahaan yang baik lebih memilih karyawan yang mempunyai komitmen tinggi untuk diikutkan dalam proses penyusunan laporan keuangan dari pada memilih karyawan yang mempunyai komitmen rendah terhadap perusahaannya. Karena kinerja manajerial yang baik akan lebih mudah dicapai bila penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh karyawan yang memiliki semangat yang kuat demi kemajuan perusahaannya. Oleh karena itu komitmen organisasi diduga memperkuat hubungan positif dalam penerapan SAP basis akrual. Hal ini berarti menunjukan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemrintahan berbasis akrual, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.Berdasarkan uraian hipotesis yang diajukan adalah :

H_2: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

3. Pengaruh sistem informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan teori *agency*, teknologi informasi membantu pegawai dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat sebagai principal. Teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Dalam rangka

mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal amat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan databaik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secarapenuh. Persiapan di bidang teknolog iinformasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi.

Penelitian sebelumnya oleh Darma Putra dan Ariyanto (2015), Kusuma (2013) memperlihatkan hubungan positif dan signifikan antara sistem informasi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2015) juga menunjukan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Teknologi informasi yang lebih maju lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah. Penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan teknologi yang andal sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pengolahan databaik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi. Semakin tinggi teknologi informasi maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual juga akan menjadi semakin baik. Berdasarkan uraian hipotesis yang diajukan adalah:

H_3:Sistem informasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

4. Pengaruh komunikasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan teori *agency*, komunikasi dalam sebuah organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu atau pegawai dapat mengumpulkan, memproses dan saling tukar menukar informasi dengan masyarakat sebagai principal. Teknologi komunikasi ditekankan pada suatu hasil data yang dapat disalurkan kepada masyarakat, sedangkan teknologi informasi lebih ditekankan pada hasil data yang diperoleh.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Ariyanto (2015) menunjukan hasil penelitian bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Safitri (2017) hasil penelitian ini menunjukan bahwa variable komunikasi berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Komunikasi antara organisasi yang baik akan memberikan nilai lebih dalam penyampaian suatu informasi suatu hasil data kepada masyarakat untuk kepentingan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa komunikasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual.Semakin tinggi komunikasi maka penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual juga akan menjadi semakin baik. Berdasarkan uraian hipotesis yang diajukan adalah:

H_4: Komunikasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

5. Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan teori *agency*, pemerintahan memiliki salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas suatu program atau kegiatan. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) yang dapat merugikan sebuah pemerintahan kepada masyarakat. Pengendalian internal juga dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efesiensi dari operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk.(2017) menunjukan hasil penelitia bahwavariable pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual.Kemudian penelitian lain yang dilakukan oleh Jaladri dan Liharjo (2016) menujukan bahwa kualitas pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. yang lebih baik.

Pengendalian internal dalam sebuah pemerintahan adalah sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didisain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian dalam efektivitas, efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

berlaku dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_5: Sistem pengendalian internberpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

D. Model Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :

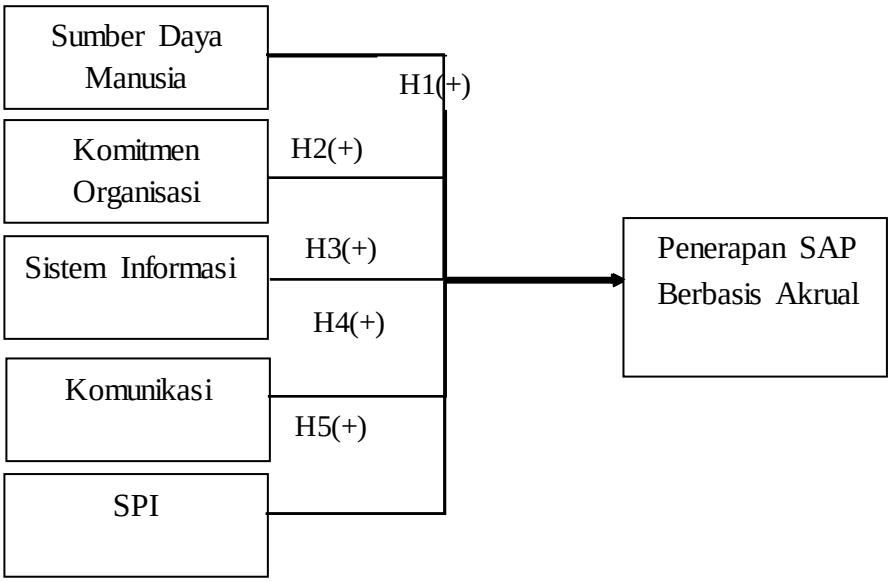

Gambar 2.1.
Model Penelitian

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012 :7). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Temanggung. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran dan Bougie, 2009:263). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai di bidang akuntansi/ keuangan di masing-masing unit OPD.

Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu dengan menggunakan kuisioner. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Pegawai OPD pada Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Temanggung.
2. Pegawai OPD yang bekerja pada bidang akuntansi/ keuangan pada Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Temanggung.
3. Pegawai OPD yang sudah bekerja selama satu tahun lebih.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analisis dengan maksud untuk menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu. Kajian ini berupaya mendeskripsikan suatu fenomena dengan apa adanya dari perspektif pelakunya, sedangkan pendeskripsiannya dilakukan dengan bantuan alat-alat analisis kuantitatif. Dengan demikian diharapkan fenomena tentang penerapan akuntansi berbasis akrual dapat dideskripsikan secara jelas untuk kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menarik suatu kesimpulan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian.Data ini diperoleh dari survey responden (Indriantoro,2009: 26).

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan survey lapangan. Survey ini dilakukan secara lebih mendalam dengan cara mengamati secara langsung pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan

secara tertulis melalui suatu kuisioner. Kuesioner diberikan kepada pegawai bagian keuangan atau bagian akuntansi pada OPD di Kabupaten Temanggung. Kuisioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuisioner yang tidak lengkap pengisianya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebuh efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuisioner yang telah disebar.

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual

Penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterpkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Akuntansi basis akrualdapat dilakukan secara *top-down* atau *bottom-up*. Bila diterapkan secara *top-down*, biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib) untuk semua entitas dalam rentang waktu (*time frame*) yang pasti dan seragam. Sedangkan bila diterapkan secara bottom-up, harus dilakukan *pilot project* terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan baik (Mulyana, 2009).

Instrumen dari variabel ini terdiri dari 3 pernyataan yang diambil dari (Ahsani, 2016). Indikator penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang digunakan adalah penerapan berbasis akrual untuk pengakuan aset kwajiban dan ekuitas, penerapan berbasis kas untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembiayaan serta penyajian secara wajar. Variabel ini di ukur

dengan menggunkan 5 point skala likert, dari mulai sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

2. Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2002: 3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah.

Instrumen dalam variabel ini teridiri dari 9 pernyataan yang di ambil dari penelitian Kusuma (2013). Indikator sumber daya manusia yang di gunakan adalah memiliki integritas, membutuhkan perhatian dan penghargaan, dukungan lingkungan kerja, kesempatan, lingkungan yang nyaman, kemauan bekerja keras, membutuhkan promsi prestasi kerja, loyalitas dan kemampuan. Variabel ini menggunakan 5 point skala likert, dari mulai sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

3. Komitmen Organisasi

Menurut Robbins (2002: 140), komitmen organisasi adalah sebagai keadaandimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Kusuma (2013) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. komitmen adalah dukungan yang kuat dari pimpinan dan bawahan satuan

kerja termasuk pimpinan OPD penerima dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan.

Instrumen dalam variabel ini adalah 8 pernyataan yang sebelumnya telah di gunakan pada penelitian terdahulu Kusuma (2013). Parameter Komitmen/ Integritas meliputi indicator kesiapan komitmen untuk tugas, kedisiplinan dan tanggung jawab, keberanian dalam bersikap, dukungan dalam pelaksanaan, tanggung jawab moral, inovasi dan obyektif, sikap komitmen dan integritas, prinsip, keinginan, dan dukungan. Variabel ini di ukur dengan menggunkan 5 point skala likert, dari mulai sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

4. Sistem informasi

Sistem informasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tersedianya teknologi informasi yang memadai, terintegrasi dan mudah digunakan. Juga mampu mengolah dan menyediakan data yang akurat dan terkini dalam kaitannya dengan penerapan sistem akuntansi akrual. Teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah (Krumwiede, 1998 dalam Kusuma, 2013).

Instrumen dalam variabel ini terdiri dari 6 pernyataan yang diambil dari peneliti Kusuma (2013) kemudian di jawab oleh responden. Indikator dalam variabel sistim informasi adalah kesiapan mempunyai platform pelaksanaan jangka menengah dan panjang, pelaksanaan kegiatan dalam

bidang keuangan, dukungan oleh informasi manajemen secara cermat dan tepat, dukungan system dalam perangkat lunak, pelatihan peningkatan kualitas perangkat lunak dan pendampingan dalam operasi pelaksanaan perangkat lunak. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 point skala likert, dari mulai sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

5. Komunikasi

Robbins (2001:392) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian dan pemahaman makna. Sehebat apapun gagasan, tidak akan berguna jika tidak diteruskan dan dipahami orang lain. Komunikasi yang baik merupakan hal yang sangat penting bagi efektivitas kelompok atau organisasi manapun. Komunikasi yang baik dalam suatu organisasi akan dapat bekerja secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas khususnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 4 pernyataan yang diadopsi dari peneliti Down dan Hazen (2003). Indikator dalam variabel komunikasi adalah perspektif komunikasi, umpan balik personal, integrasi organisasi dan komunikasi atasan langsung. Variabel ini di ukur dengan menggunakan 5 point skala likert, dari mulai sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

6. Sistem pengendalian intern

Arens et al (2008) sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk menyediakan jaminan yang layak mengenai pencapaian

dari sasaran manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efesiensi dari operasional.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari 5 pernyataan yang diadopsi dari peneliti Nurillah (2014) kemudian harus di jawab oleh responden. Indikator dalam variabel system pengendalian interal adalah *Standard Operating Procedure* (SOP), implementasi standar akuntansi basis akrual, dokumen dan catatan yang memadai, pemisahan wewenang dan tindakan disiplin atas pelanggaran Variabel ini di ukur dengan menggunakan 5 point skala likert, dari mulai sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

D. Metoda Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis statistik yang menggambarkan sekumpulan data pengamatan untuk menyederhanakan, meringkas dan menyajikan informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dipahami. Analisis ini digunakan untuk mengetahui profil tanggapannya atas variabel penelitian yang diajukan melalui instrumen penelitian (kuesioner). Sugiyono (2012: 29) Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *varian*, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan padakuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016: 52). Uji Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai undimensioalitas ataua pakah indicator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah konstruk atauvariable . Jika masing-masing indicator merupakan indicator pengukuran konstruk maka akan memiliki nilai loading yang tinggi. Asumsi yang mendasari digunakanan alisis factor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Spericity* merupakan uji statistic untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Bartletttest* semakin sensitive untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat inter korelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukanan alisis factor masalah. *Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Milai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus >0.50 dan*cross Loading* >40 untuk dapat dilakukan analisis (Hair,dkk,2006: 112).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai (α) > 0,07 (Ghozali, 2016: 99).

3. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda yaitu analisa untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan pengujian koefisien regresi dengan rumus:

PSAPBA= α + β1 SDM + β2 KO + β3 SI +β4 K+β5 SPI +*e*

Keterangan :

PSAPBA	: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
α	: Konstanta
$\beta_{1,2,3,4,5}$	: Koefisien regresi
SDM	: Sumber daya manusia
KO	: Komitmen organisasi
SI	: Sistem informasi
I	: Komunikasi
SPI	: Sisitem pengendalian intern
e	: *error tern*

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016: 95).

b. Uji F(*Goodness Of Fit*)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan kedalam variabel model regresi terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016: 95). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan df=n-k-1 dan uji satu sisi, sebagai berikut:

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau*probability value (p value)* < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya model penelitian dapat dikatakan cocok (*fit*).

2) Jika Fhitung< Ftabel atau p value > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya model dalam penelitian tidak cocok (tidak *fit*).

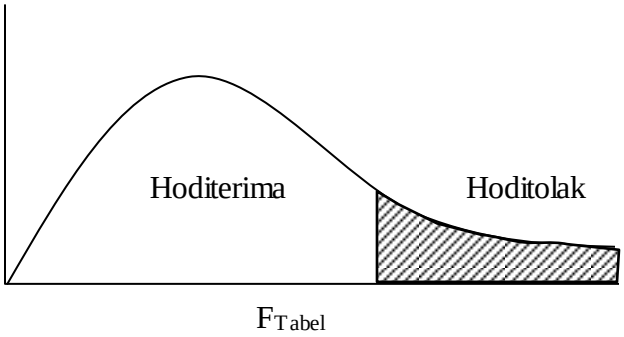

Gambar 3.1

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen, untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikannya dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Langkah dalam pengujian koefisien regresi adalah menentukan tingkat segnifikasi α dengan tingkat signifikasi yang umum digunakan yaitu 5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2016: 99), yang ditunjukan dengan kriteria:

1) Jika t hitung > t tableatau p value< α = 0.05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2) Jika t hitung < t tabel atau p value > α = 0.05, maka Ho diterima atau Ha tidak dapat diterima, artinya variabel dependen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

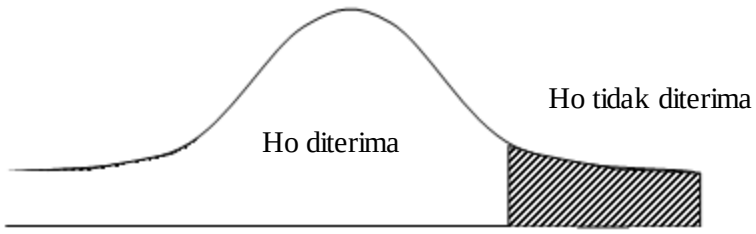

Gambar 3.2
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tandar akuntansi pemerintah berbasis akrualini dilakukan pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji R^2 menunjukkan besarnya nilai *Adjusted* R^2sebesar 0,452, hal ini berarti bahwa kulitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, kominikasi dan pengawasan intern dalam menjelaskan variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sebesar 45,20%, sedangkan sisanya 54,80% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian atau selain variabel kulitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi, komunikasi dan pengawasan intern.
2. Hasil analisis melalui uji F dapat dikemukakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini bagus (*good fit*).
3. Hasil analisis individual dapat dikemukakan bahwa komitmen organisasi, sistem informasi, komunikasi dan pengawasan intern berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual, sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengawasan intern tidak berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan pada sektor pemerintah dan penerapan SAP berbasis akrual menjadi kewajiban setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
2. Penelitian belum mempertimbangkan aspek kepemimpinan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berasis akrual.

C. Saran-saran

Berdasarkan keterbatasan peneltian, maka saran-saran yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut

1. Penelitian selanjutnya agar dapat mengambil obyek penelitian perusahaan swasta yang mempunyai kompleksitas masalah yang besar sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel kepemimpinan, dengan alasan bahwa pimpinan merupakan pemberian perintah dalam penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Syukriy. 2006. *Basis Akuntansi Pemerintahan*. (Online) http : // syukriy.wordpress.com. (2015, November).

Adventana, Gabriella Ara dan Ch. Heni Kurniawan. 2015. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Provinsi DIY dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Menurut PP No 71 tahun 2010. *Jurnal Penelitian Universitas Udayana*.

Ahsani, Irfan. 2016. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kompentensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD. *Jurnal Penelitian UMY.*

Aldiani, Sulani. 2010. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. *Jurnal Akuntansi 12, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.*Universitas Sumatra Utara.

Arenset al. (2008). *Sistem Pengendalian Internal*.Terjemahan Olen Amir Abadi Yusuf. Buku Dua. Edisi Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga :Jakarta.

Dewi.Purnawati.Herawati. 2017. Pengaruh Kwalitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual pada SKPD Kabupaten Bangli. *Journal S1 Ak.Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S.Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017.*

Down dan Hazen.(2003).*Reality and Buillding*.Volume 209. Problem 1-13. Northwestern: The Economist. Pup.Co.

Fitrizal.Riyan. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. *Skripsi.*Padang: Universitas Negeri Padang.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS* 23.Cetakan VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Grigg, Neil, & Fontane G. Darrel, 2000.*Infrastructure System Management & Optimization.Internasional Seminar "Paradigm & Strategy of Infrastructure Management"* Civil Engeenering Departement Dipononegoro University.

Grigg, Neil. 2000. *Infrastructure Engineering and Management*.John Wiley and Sons.

Hair, Joseph F et al. 2006. *Multi Variate Data Analysis.* Fifth Edition. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Haryanto. 2012. Pengertian Media Pembelajaran. Online http://belajar psikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/ 29 September 2012.

Hasibuan, S.P. Malayu. 2000.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasibuan, Dini Rahmi, Iskandar Muda. 2013. "Analisis Penerapan PenuhPeraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 Tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akral (Kasus PadaPemerintah Kota Medan).*Skripsi, Dipublikasikan, UniversitasSumatera Utara.*

Herlina, Oktafiani. 2013. Komunikasi Pemasaran Pariwisata DIY melalui Pemanfaatan E-Tourism oleh Swasta dan Pemerintah (Studi Komparatif www.visitingjogja.com dan www.Yogyes.com). *Tesis*. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.

Hidayah, Kemal dan Rustan A. (2015).Analisis Penerapan Unsur Lingkungan Pengendalian SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.*Jurnal Borneo Administrator, Vol 11/No. 1/2015. PKP2A III LAN*, Samarinda.

Hudson, Ronald W, Haas, Ralph and Waheed Uddin. 1997. *Infrastructure Management*. McGraw-Hill.

Indriantoro, N. 2009.*Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Jaladri dan Liharjo. 2016. Faktor-Yaktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual Pada STIESIA Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11.*

Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour,Agency Costs and Ownership Stucture. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.

Jogiyanto. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*. BPFE UGM, Yogyakarta.

Kieso,Donald E. Dkk. 2008.*Akuntansi Intermediate,* Edisi Keduabelas, Jilid 1 Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kodoatie, R. J. 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Krumwiede, K. 1998. The Implementation Stages of Activity Based Costing and The Impact of Contextual and Organizatinal Factors. *Journal of Management Accounting Reserch,* 10: 239-277.

Kusuma, Muhammad I. Y. 2013.Analisis Faktor-Faktor Yang MempengaruhiTingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah.*Skripsi:Universitas Diponegoro Semarang*.

Kusuma, Ririz Setiawati. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam MenerapkanStandar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Kasus Pada PemerintahKabupaten Jember. *Skripsi : Universitas Negeri Jember*.

Langelo, Friska. David Paul Elia Saerang. Stanly Winylson Alexander. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Bitung. *Jurnal EMBA, Vol.3, No. 1, 2015, Hal. 1-8*

Nazier, Daeng.2009.*Kesiapan SDM Pemerintah Menuju Tata KelolaKeuanganNegara yang Akuntabel dan Transparan*.Seminar Nasional. Diakses di www.bpk.go.id

Nurlaila.2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Universitas Sliwangi Tasikmalaya.*

Mahsun, Mohamad et al. 2011. *Akuntansi Sektor Publik (edisi 3)*.Yogyakarta: BPFE – Yogyakarta.

Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi (Haris Munandar, Penerjemah).* Jakarta: Erlangg.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Miner, John B. 1992. *Industrial-Organizational Psychology*. Singapore: McGraw-Hill.

Moeller dan Robert. 2007. *Brink's Modern Internal Auditing:* A Common Body Of Knowledge.Electronic Book. USA.

Mukhtar, A.M. 2002. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstuktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*.Edisi ke-1. Andi Offset, Yogyakarta.

Mulyana, Budi. 2009.Penggunaan Akuntansi Akrual Di Negara-Negara Lain ;Tren diNegara-Negara Anggota OECD.

Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar AkuntansiPemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar AkuntansiPemerintah Berbasis Akrual.

Putra dan Ariyanto. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah BerbasisAkrual.*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.*

Robbins, Stephen P. 2002. *Perilaku Organisasi, Edisi ke-10*. PT. Indeks, Jakarta.

Robert J. Kodoatie, 2003. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*.Jakarta: PT. Erlangga.

Safitri, Devi. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada kabupaten bengkalis.*Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 2, April 2017 : 174-189.*

Sekaran, uma dan Roger Bougie. (2010). Edisi 5, *Research Method For Business: A Skill Building Approach*. John Wiley @ Sons, New York.

Sudjana. 2002. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukadana, Ikrima Chikitadan Ni Putu Sri Harta Mimba. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Denpasar. *Jurnal Penelitian Universitas Udayana*.

Widjajarso,Bambang. 2008. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi PemerintahIndonesia*:Sebuah Kajian Pendahuluan*. di www.bpk.go.id

Widyastuti, Ni Made Ari, Edy Sujana dan I Made Pradana Adiputra. 2015. Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam MenerapkanStandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar.*Jurnal Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha*.

www.bpk.go.id diunduh tanggal 1 April 2017

www.wikipedia.org diunduh tanggal 12 November 2015

Xu, Hongjiang, Jeretta H.N., G. Daryl Nord, Binshan Lin. 2003. "Key issue of accounting information quality management : Australian case studies*". Industrial Mangaement & Data System 103/7, 461- 470.*